KEBUMEN SEMARAK

KEBUMEN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022





GEOPARK KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

Reform ⟷ **Pemenuhan**

KOMPONEN PENGUNGKIT				
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4. PENATAAN TATA LAKSANA
	5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	6. PENGUATAN AKUNTABILITAS	7. PENGUATAN PENGAWASAN	8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

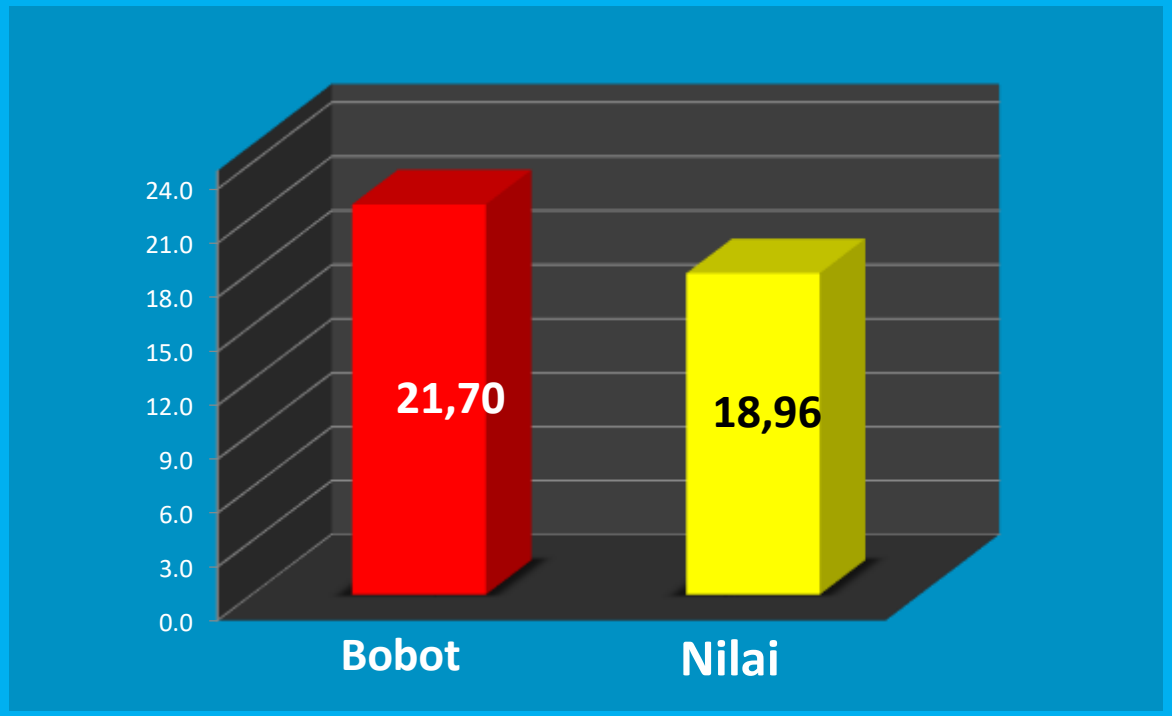


PROGRESS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

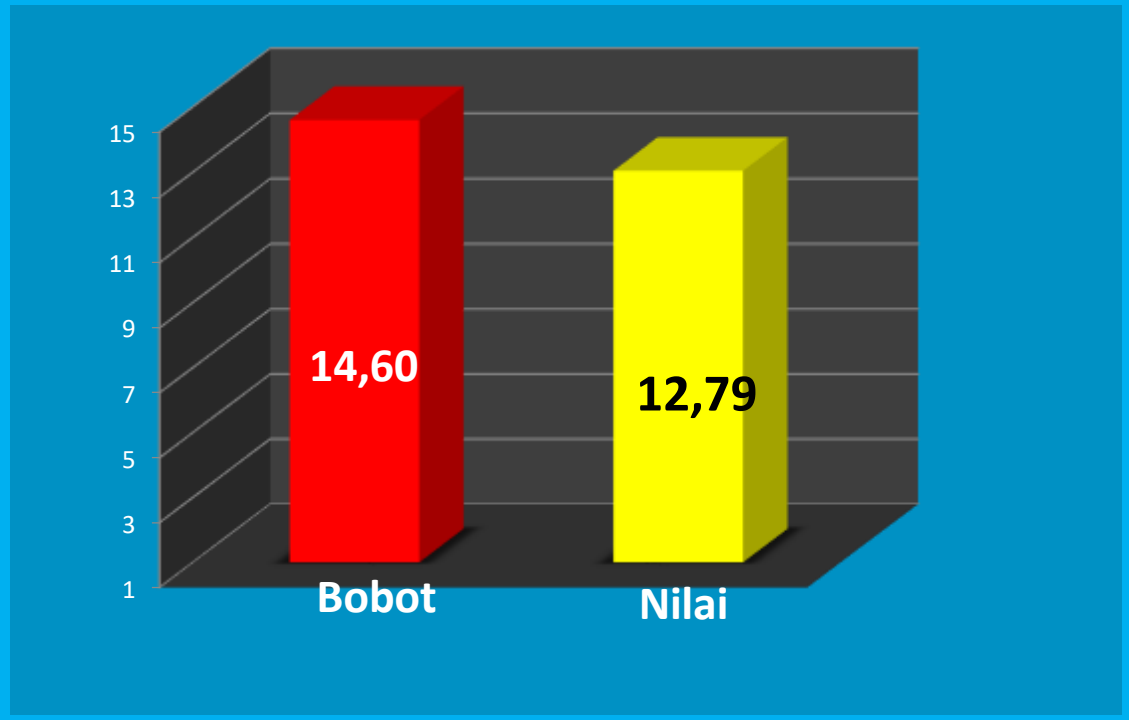


Disnaker Kab. Kebumen Tahun 2022 yaitu **31,75** dari nilai maks **36,30** atau **87,48%** dengan kategori **A**
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

REFORM



PEMENUHAN



Tabel Index Reformasi Birokrasi Unit Disnaker Kabupaten Kebumen

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
	PENGUNGKIT	36,30	31,75
A.	PEMENUHAN	14,60	12,79
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,68
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	075
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	200
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,84
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,19
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,65
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,19





KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

Tabel Index Reformasi Birokrasi Unit Disnaker Kabupaten Kebumen

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
B.	REFORM	21,70	18,96
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,75
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	0,75
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	2,63
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,39
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	375

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

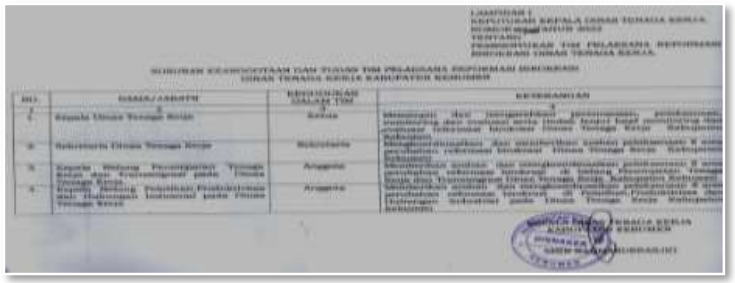
#bangga melayani bangsa

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

- ✓ **Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi**
- ✓ **Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja**
- ✓ **Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja**
- ✓ **Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja**













2. DEREGULASI KEBIJAKAN



Sudah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan kebijakan/peraturan yang tidak harmonis yaitu Perda No 5 Tahun 2014 tentang Penempatan Dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia sedangkan aturan baru UU No. 18 tahun 2017 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai

MATRIK KAJIAN REVISI PERDA NOMOR 5 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Daerah Sebelum Perubahan	Peraturan Daerah Revisi Perubahan	Kajian Telaah	Keterangan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR..... TAHUN ..... TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA		sudah tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR..... TAHUN ..... TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA	perubahan istilah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN,

DISNAKER

AMIN RAHMANURASJID, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006

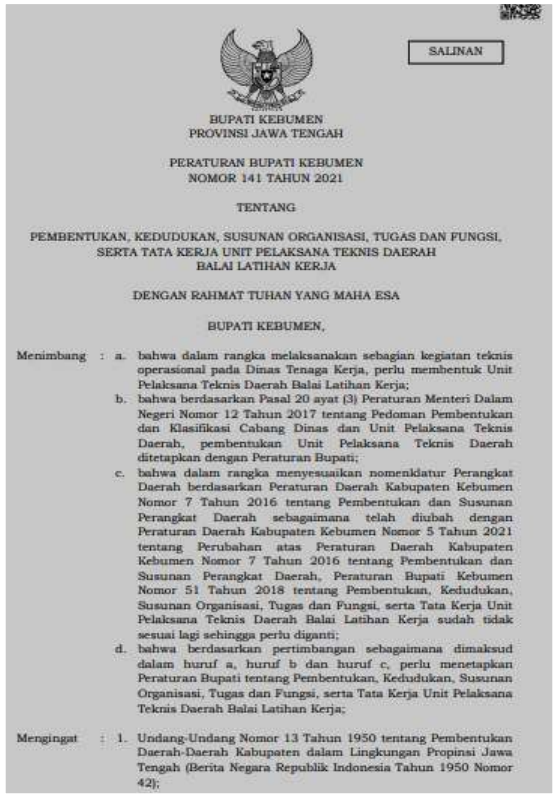
KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq
Bersama Rakyat

bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

- ✓ Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
- ✓ Namun sampai sudah mengacu ini masih mengacu Perbup no.117 tahun 2021 dan Perda No.5 tahun 2021 yang merupakan revisi Perbup no.71 tahun 2016 dan Perda No.7 tahun 2016



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

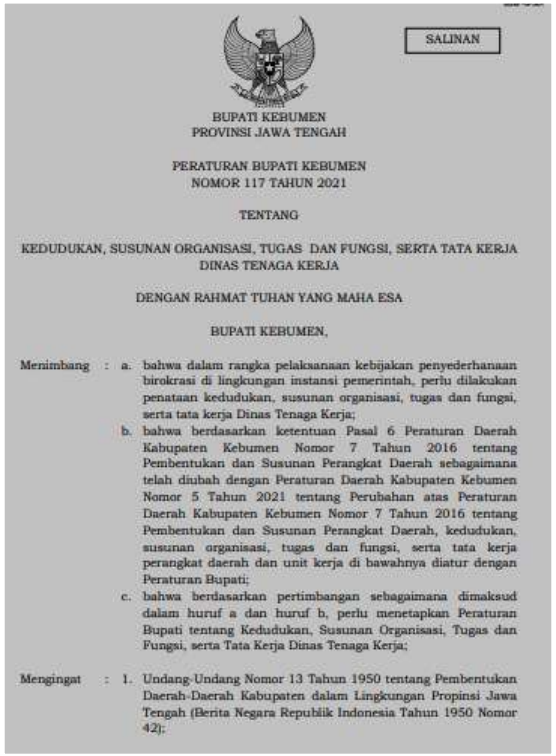
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Tenaga Kerja, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja;
b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq
Bersama Rakyat

#bangga melayani bangsa



4. PENATAAN TATA LAKSANA



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Cendrawasih No 28 Kebumen Telepon (0287) 381462
Faksimile (0287) 381462 Website : disnaker.kebumenkab.go.id/
Email : disnaker@kebumenkab.go.id
Kode Pos 54313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 060 / 1922 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang ketatalaksana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses, perlu menetapkan peta proses bisnis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Nomor 560/2528 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen tentang Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tas 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	: 24 Januari 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 24 Januari 2022
Disahkan Oleh	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
Nama SOP	PEMBUATAN DOKUMEN KERJASAMA ANTAR DAERAH (KSAD)

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 52 Tahun 2012 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ata Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati Kebumen NO. 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, sertra Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait transmigrasi
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Kerja sama antar daerah
3. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
4. Mampu membaca peta lokasi, menganalisa dan memberikan masukan



1	Penerjemahan surat masuk	189.8/9758	10 Desember 2018	11 Desember 2018
2	Penerjemahan surat keluar	189.8/9758.1	10 Desember 2018	11 Desember 2018
3	Penerjemahan sosialisasi/kan masyarakat	189.8/9758.2	10 Desember 2018	11 Desember 2018
4	Jawan kenaikan pangkat	189.8/9758.3	10 Desember 2018	11 Desember 2018
5	Kenaikan gaji berkala	189.8/9758.4	10 Desember 2018	11 Desember 2018
6	Pembuatan surat ijin cuti	189.8/9758.5	10 Desember 2018	11 Desember 2018
7	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	189.8/9758.6	10 Desember 2018	11 Desember 2018
8	Pengaturan hukuman disiplin pegawai pada perangkat dae	189.8/9758.7	10 Desember 2018	11 Desember 2018
9	Penyusunan susunan kerja pegawai	189.8/9758.8	10 Desember 2018	11 Desember 2018
10	Pengelolaan barang inventaris (asset: BHD/BMN	189.8/9758.9	10 Desember 2018	11 Desember 2018
11	Pengajuan surat permah membayar LS Gaji	189.8/9758.10	10 Desember 2018	11 Desember 2018
12	Laporan Keuangan perangkat daerah	189.8/9758.11	10 Desember 2018	11 Desember 2018
13	Penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah	189.8/9758.12	10 Desember 2018	11 Desember 2018
14	Pengajuan surat permah membayar uang persediaan (UP	189.8/9758.13	10 Desember 2018	11 Desember 2018
15	Pengajuan surat permah membayar ganti uang persediaa	189.8/9758.14	10 Desember 2018	11 Desember 2018
16	Pengajuan surat permah membayar tambahan uang (TU)	189.8/9758.15	10 Desember 2018	11 Desember 2018
17	Pengajuan surat permah membayar tunai	189.8/9758.16	10 Desember 2018	11 Desember 2018
18	Pengajuan surat permah membayar LS Barang/jasa	189.8/9758.17	10 Desember 2018	11 Desember 2018
19	Pelatihan berbasis kompetensi	189.8/9758.18	10 Desember 2018	11 Desember 2018
20	Pelayanan pendaftaran calon peserti pelatihan	189.8/9758.19	10 Desember 2018	11 Desember 2018
21	Pelaksanaan tes seleksi calon peserta pelatihan	189.8/9758.20	10 Desember 2018	11 Desember 2018
22	Pengumuman hasil tes seleksi calon peserta pelatihan	189.8/9758.21	10 Desember 2018	11 Desember 2018
23	Daftar ulang peserta pelatihan	189.8/9758.22	10 Desember 2018	11 Desember 2018
24	Pelatihan kewirausahaan	189.8/9758.23	10 Desember 2018	11 Desember 2018
25	Pelayanan apor AK1	189.8/9758.24	10 Desember 2018	11 Desember 2018
26	Penerbitan AK1	189.8/9758.25	10 Desember 2018	11 Desember 2018
27	Pelayanan AK1 Hilang	189.8/9758.26	10 Desember 2018	11 Desember 2018
28	Layanan rekomendasi paspor calon pekerja negara indone	189.8/9758.27	10 Desember 2018	11 Desember 2018
29	Pelayanan legalisir AK1	189.8/9758.28	10 Desember 2018	11 Desember 2018

- ✓ **Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis**
- ✓ **Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang**
- ✓ **Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.**
- ✓ **Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (leaflet, baliho, banner, web dinas, media sosial)**





KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq
Bersama Rakyat

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

- ✓ Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
- ✓ Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi / diklat / bimtek kepada sebagian besar pegawai
- ✓ Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
- ✓ Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai
- ✓ Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan
- ✓ Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment* lainnya
- ✓ Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan
- ✓ Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala
- ✓ Mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat
- ✓ Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM



KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq
Bersama Rakyat









bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

- ✓ **Pimpinan Disnaker selalu terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, seperti kegiatan forum Renstra OPD, Penyusunan Renja, Penyusunan Renstra, Rapat penyusunan Anggaran**
- ✓ **Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala**

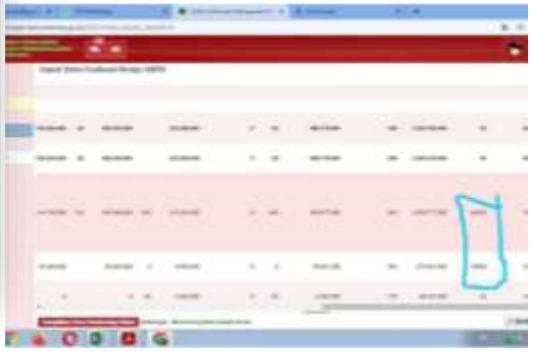






KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat









BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

7. PENGUATAN PENGAWASAN

- ✓ Telah dilakukan *public campaign* secara berkala
- ✓ Unit Pengendalian Gratifikasi sudah melaporkan secara berkala ke isnpektorat
- ✓ Telah dilaksanakan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
- ✓ Terdapat laporan tindak lanjut pada Dinas Tenaga Kerja
- ✓ Telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian
- ✓ Telah menilai sebagian besar risiko
- ✓ Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
- ✓ SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait
- ✓ SPI dimonitoring dan evaluasi secara berkala
- ✓ Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
- ✓ Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
- ✓ Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
- ✓ Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan dilaporkan









BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq
Bersama Rakyat









8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- ✓ Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik
- ✓ Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders
- ✓ Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/ pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
- ✓ Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
- ✓ Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
- ✓ Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras











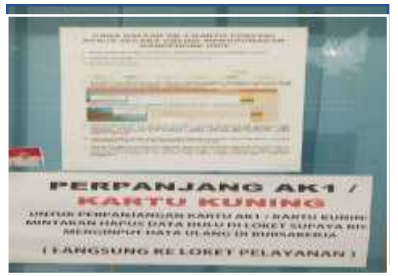












KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LANJUTAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- ✓ Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
- ✓ Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi
- ✓ Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
- ✓ Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala
- ✓ Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun
- ✓ Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara *online* (*website*, media sosial, dll) dan *offline* .. skm.kebumenkab.go.id
- ✓ Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses





















KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

Inovasi

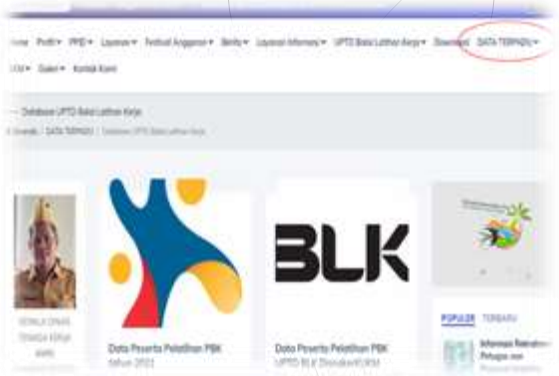
pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain:

1. Program Bursa Kerja Kebumen bagi Pencari Kerja “BUKARAJA“.
2. Sinergitas Pengelolaan Kearsipan Melalui Klinik Konseling “klinik Lingsir”.
3. Sistem Informasi Data Terpadu “ SI DADU”.
4. Program Unggulan di bidang agama, memiliki mampu menciptakan lapangan kerja ”SANTRI MUMPUNI”.
5. Program Bantuan Biaya Pemberangkatan dan Perlindungan PMI “BAYA MANGAP”.
6. Program Pelatihan dan Magang ‘’LANANG”.
7. Pendataan Tenaga Kerja Secara Online

INOVASI PELAYANAN DISNAKER



















KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PROGRAM LAWET MUDA KREATIF

KEBUMEN SEMARAK
Sehat, Maju, Berakhlak
Sejahtera Sayidi



Lawet Muda Kreatif merupakan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, yaitu program pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen

MANFAAT :

- ✓ peningkatan kapasitas tenaga kerja
- ✓ menekan angka pengangguran

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PEMENUHAN

REFORMASI BIROKRASI

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

PEMENUHAN-REFORMASI BIROKRASI

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1	**MANAJEMEN PERUBAHAN**	**2,00**	**1,68**
	• Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,31
	• Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
	• Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,63
	• Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40	0,33
2	**DEREGULASI KEBIJAKAN**	**1,00**	**0,75**
	• Harmonisasi	1,00	0,75
3	**PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI**	**2,00**	**2,00**
	• Evaluasi Kelembagaan	1,00	1,00
	• Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00







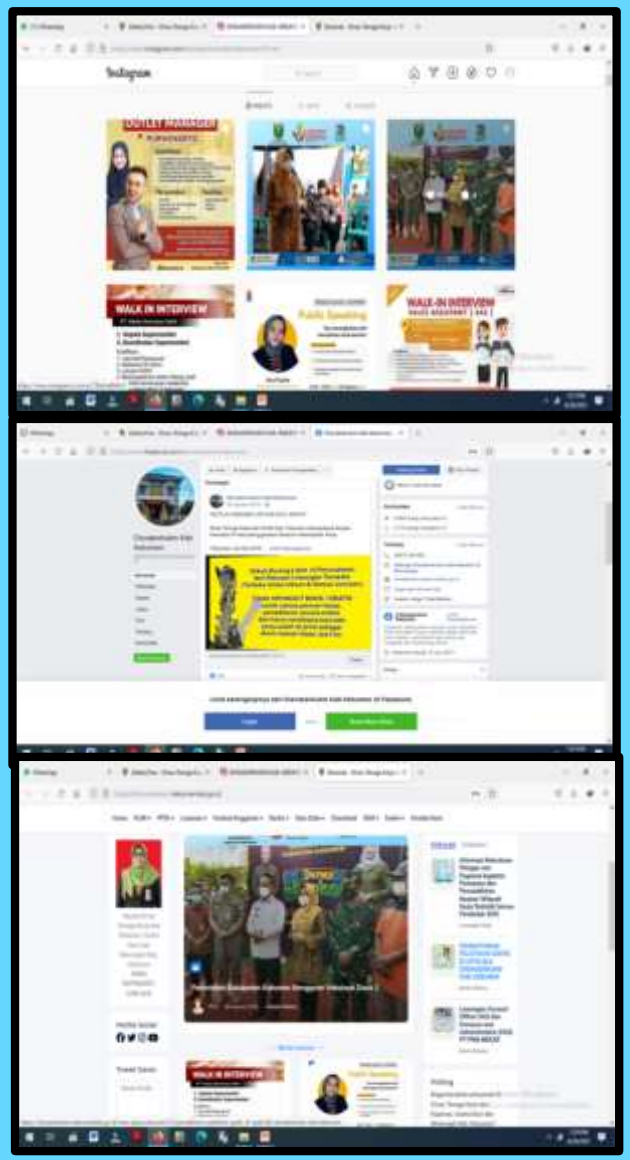
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PEMENUHAN-REFORMASI BIROKRASI

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq
Bersama Rakyat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
4	**PENATAAN TATA LAKSANA**	**1,00**	**0,84**
	• Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,46
	• Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,38
5	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**	**1,40**	**1, 19**
	• Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,20	0,20
	• Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,17
	• Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,36
	• Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,12
	• Pelaksanaan Evaluasi Jabatan • Sistem Informasi Kepegawaian	0,20 0,20	0,14 0,20



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PEMENUHAN-REFORMASI BIROKRASI

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
6	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**	**2,50**	**2,50**
	• Keterlibatan pimpinan	1,00	1,00
	• Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50
7	**PENGUATAN PENGAWASAN**	**2,20**	**1,65**
	• Gratifikasi	0,30	0,30
	• Penerapan SPIP	0,30	0,25
	• Pengaduan Masyarakat	0,50	0,25
	• *Whistle Blowing System*	0,30	0,30
	• Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,21
	• Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,33





PEMENUHAN-REFORMASI BIROKRASI

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
8	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**	**2,50**	**2,19**
	• Standar Pelayanan	0,40	0,32
	• Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,29
	• Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,48
	• Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	0,70	0,70
	• Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

NO	URAIAN	PENJELASAN/ PERMASALAHAN	SOLUSI/ TINDAK LANJUT
A	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		
1	Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja	Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	Sebagian tugas Tim RB yang belum terlaksana dapat dilaksanakan
2	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokras unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Sebagian rencana kerja yang belum di monev dan ditindaklanjuti agar dapat di monev dan ditindaklanjuti
3	Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB	Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas	Konsensus seluruh assessor mencapai konsensus agar seluruh kriteria dapat dibahas
4	Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja	Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Sebagian rencana kerja yang belum monev dan ditindaklanjti dan agar dapat ditindaklanjuti
5	Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	Telah terdapat *Agent of Change* dan *role model* yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja	*Agent of Change* dan *role model* yang dibentuk secara formal agar dapat memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja

NO	URAIAN	PENJELASAN/ PERMASALAHAN	SOLUSI/ TINDAK LANJUT
B	DEREGULASI KEBIJAKAN		
1	Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai	Penyelesaian revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
C.	EVALUASI KELEMBAGAAN		
D	PENATAAN TATALAKSANA		
1.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Prosedur operasional tetap (SOP) dapat diterapkan seluruhnya
2.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti	Hasil evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP dan seluruh hasilnya ditindaklanjuti
3.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

NO	URAIAN	PENJELASAN/ PERMASALAHAN	SOLUSI/ TINDAK LANJUT
E	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
1	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai	Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh besar pegawai dapat dilaksanakan
2	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan	Agar dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan
3	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala	Monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dilaksankan secara berkala
4	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat	Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja
	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM	Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ yang memberikan dampak pengembangan SDM

NO	URAIAN	PENJELASAN/ PERMASALAHAN	SOLUSI/ TINDAK LANJUT
F	PENGUATAN AKUNTABILITAS		
G	PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja	Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko	Resiko agar di nilai seluruhnya
2.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian	Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
3	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala
4	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian besar pegawai	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke seluruh pegawai
5	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
6	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
7	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif	Pembangunan zona integritas dilakikan secara intensif
8	Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas	Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala	Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala

NO	URAIAN	PENJELASAN/PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
J	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku	Penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
2.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
3	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan
4	Telah terdapat inovasi pelayanan	Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain	Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain

NO	URAIAN	PENJELASAN/PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
J	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku	Penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
2.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
3	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan

NO	URAIAN	PENJELASAN/PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
4	Telah terdapat inovasi pelayanan	Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain	Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain
5.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
6.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

REFORM

REFORMASI BIROKRASI

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat

REFORM - REFORMASI BIROKRASI

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1	**MANAJEMEN PERUBAHAN**	**3,00**	**2,75**
	• **Komitmen dalam Perubahan**	1,50	1,50
	• **Komitmen Pimpinan**	1,00	075
	• **Membangun Budaya Kerja**	0,50	0,50
2	**DEREGULASI KEBIJAKAN**	**2,00**	**2,00**
	• **Peran Kebijakan**	2,00	2,00
3	**PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI**	**1,50**	**0,75**
	• **Organisasi Berbasis Kinerja**	1,50	0,75



REFORM - REFORMASI BIROKRASI

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
4	**PENATAAN TATALAKSANA**	**3,75**	**2,63**
	• Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50	0,50
	• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,25	0,63
	• Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00	1,50
5	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**	**2,00**	**1,75**
	• Kinerja Individu	1,00	0,50
	• Assessment Pegawai	0,50	0,25
	• Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,50





KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq Bersama Rakyat

REFORM - REFORMASI BIROKRASI

#bangga melayani bangsa
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
6	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**	**3,75**	**3,39**
	• Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,97
	• Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas	1,00	1,00
	• Pemberian Reward and Punishment	1,00	1,00
	• Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,75
7	**PENGUATAN PENGAWASAN**	**1,95**	**1,95**
	• Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75
	• Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60	0,60
	• Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60
8	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**	**3,75**	**3,75**
	• Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50
	• Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	1,25





NO	URAIAN	PENJELASAN/ PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
A	MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai	Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
C.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		
1	Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.	Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan	Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan

NO	URAIAN	PENJELASAN/PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
D	PENATAAN TATALAKSANA		
1	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
2	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
3	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	Kriteria terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.	Kriteria terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan

NO	URAIAN	PENJELASAN/PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
E	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
1	Hasil *assessment* telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Hasil *assessment* belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	Seluruh hasil *assessment* dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai
F	PENGUATAN AKUANTABILITAS		
1	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian *reward and punishment* oleh unit kerja	Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian *reward and punishment*	Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian *reward and punishment*
2	Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:	93,88%	100 %
3	Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;	Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai





Terimakasih

- **Disnaker Kabupaten Kebumen**
- **disnakerkabkebumen@kebumenkab.go.id**
- **https://disnaker.kebumenkab.go.id**

Jl. Cendrawasih Nomor 28
Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54311